



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kepastian hukum, diperlukan penegasan penetapan desa di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Desa yang terletak di 19 (sembilan belas) wilayah Kecamatan di Daerah.
- (2) Setiap Desa memiliki Kode Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN


TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (23 Juli 2024/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBAH, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang intinya menyatakan bahwa penetapan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Berkaitan dengan penetapan desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan desa-desa yang telah ada dan mendapatkan kode desa sesuai ketentuan yang beriakui di Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 118



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN DESA.

DAFTAR NAMA DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
I	Kandangserang	1.	Klesem	33.26.01.2001
		2.	Bodas	33.26.01.2002
		3.	Sukoharjo	33.26.01.2003
		4.	Gembong	33.26.01.2004
		5.	Garungwiyoro	33.26.01.2005
		6.	Bojongkoneng	33.26.01.2006
		7.	Bubak	33.26.01.2007
		8.	Wangkelang	33.26.01.2008
		9.	Kandangserang	33.26.01.2009
		10.	Luragung	33.26.01.2010
		11.	Lambur	33.26.01.2011
		12.	Tajur	33.26.01.2012
		13.	Trajumas	33.26.01.2013
		14.	Karanggondang	33.26.01.2014
II	Paninggaran	1.	Werdi	33.26.02.2001
		2.	Winduaji	33.26.02.2002
		3.	Krandegan	33.26.02.2003
		4.	Lumeneng	33.26.02.2004
		5.	Tanggeran	33.26.02.2005
		6.	Kaliboja	33.26.02.2006
		7.	Kaliombo	33.26.02.2007
		8.	Botosari	33.26.02.2008
		9.	Sawangan	33.26.02.2009
		10.	Paninggaran	33.26.02.2010
		11.	Domiyang	33.26.02.2011
		12.	Notogiwang	33.26.02.2012
		13.	Lambanggelun	33.26.02.2013
		14.	Tenogo	33.26.02.2014
		15.	Bedagung	33.26.02.2015
III	Lebakbarang	1.	Tembelangunung	33.26.03.2001
		2.	Pamutuh	33.26.03.2002

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
		2.	Pamutuh	33.26.03.2002
		3.	Depok	33.26.03.2003
		4.	Wonosido	33.26.03.2004
		5.	Timbangsari	33.26.03.2005
		6.	Sidomulyo	33.26.03.2006
		7.	Kutorembet	33.26.03.2007
		8.	Lebakbarang	33.26.03.2008
		9.	Kapundutan	33.26.03.2009
		10.	Bantarkulon	33.26.03.2010
		11.	Mendolo	33.26.03.2011
IV	Petungkriyono	1.	Simego	33.26.04.2001
		2.	Gumelem	33.26.04.2002
		3.	Tlogohendro	33.26.04.2003
		4.	Yosorejo	33.26.04.2004
		5.	Curugmuncar	33.26.04.2005
		6.	Songgodadi	33.26.04.2006
		7.	Tlogopakis	33.26.04.2007
		8.	Kasimpar	33.26.04.2008
		9.	Kayupuring	33.26.04.2009
V	Talun	1.	Mesoyi	33.26.05.2001
		2.	Jolotigo	33.26.05.2002
		3.	Sengare	33.26.05.2003
		4.	Donowangun	33.26.05.2004
		5.	Talun	33.26.05.2005
		6.	Banjarsari	33.26.05.2006
		7.	Kalirejo	33.26.05.2007
		8.	Batursari	33.26.05.2008
		9.	Karangasem	33.26.05.2009
		10.	Krompeng	33.26.05.2010
VI	Doro	1.	Pungangan	33.26.06.2001
		2.	Sidoharjo	33.26.06.2002
		3.	Lemahabang	33.26.06.2003
		4.	Rogoselo	33.26.06.2004
		5.	Harjosari	33.26.06.2005
		6.	Larikan	33.26.06.2006
		7.	Sawangan	33.26.06.2007
		8.	Dororejo	33.26.06.2008



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
		9.	Randusari	33.26.06.2009
		10.	Kutosari	33.26.06.2010
		11.	Wringinagung	33.26.06.2011
		12.	Kalimojosari	33.26.06.2012
		13.	Bligorejo	33.26.06.2013
		14.	Doro	33.26.06.2014
VII	Karanganyar	1.	Gutomo	33.26.07.2001
		2.	Limbangan	33.26.07.2002
		3.	Karanggondang	33.26.07.2003
		4.	Lolong	33.26.07.2004
		5.	Pedawang	33.26.07.2005
		6.	Pododadi	33.26.07.2006
		7.	Legokkalong	33.26.07.2007
		8.	Karangsari	33.26.07.2008
		9.	Kulu	33.26.07.2009
		10.	Banjarejo	33.26.07.2010
		11.	Wonosari	33.26.07.2011
		12.	Sokosari	33.26.07.2012
		13.	Sidomukti	33.26.07.2013
		14.	Kayugeritan	33.26.07.2014
		15.	Kutosari	33.26.07.2015
VIII	Kajen	1.	Tambakroto	33.26.08.2001
		2.	Kutorajo	33.26.08.2002
		3.	Linggoasri	33.26.08.2003
		4.	Brengkolang	33.26.08.2004
		5.	Pringsurat	33.26.08.2005
		6.	Sokoyoso	33.26.08.2006
		7.	Sinangohprendeng	33.26.08.2007
		8.	Kajongan	33.26.08.2008
		9.	Pekiringanageng	33.26.08.2009
		10.	Gandarum	33.26.08.2010
		11.	Sabarwangi	33.26.08.2011
		12.	Kalijoyo	33.26.08.2012
		13.	Wonorejo	33.26.08.2013
		14.	Pekiringanalit	33.26.08.2014
		15.	Kutorejo	33.26.08.2015
		16.	Nyamok	33.26.08.2017



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
		17.	Tanjungkulon	33.26.08.2018
		18.	Tanjungsari	33.26.08.2019
		19.	Gejlig	33.26.08.2020
		20.	Kebonagung	33.26.08.2021
		21.	Sangkanjoyo	33.26.08.2022
		22.	Salit	33.26.08.2023
		23.	Sambiroto	33.26.08.2024
		24.	Rowolaku	33.26.08.2025
IX	Kesesi	1.	Windurojo	33.26.09.2001
		2.	Ujungnegoro	33.26.09.2002
		3.	Brondong	33.26.09.2003
		4.	Podosari	33.26.09.2004
		5.	Langensari	33.26.09.2005
		6.	Jagung	33.26.09.2006
		7.	Kwasen	33.26.09.2007
		8.	Karyomukti	33.26.09.2008
		9.	Kesesi	33.26.09.2009
		10.	Srinahan	33.26.09.2010
		11.	Kaibahan	33.26.09.2011
		12.	Karangrejo	33.26.09.2012
		13.	Watugajah	33.26.09.2013
		14.	Watupayung	33.26.09.2014
		15.	Krandon	33.26.09.2015
		16.	Ponolawen	33.26.09.2016
		17.	Kalimade	33.26.09.2017
		18.	Sidomulyo	33.26.09.2018
		19.	Sidosari	33.26.09.2019
		20.	Mulyorejo	33.26.09.2020
		21.	Pantirejo	33.26.09.2021
		22.	Kwigaran	33.26.09.2022
		23.	Sukorejo	33.26.09.2023
X	Sragi	1.	Ketanonageng	33.26.10.2001
		2.	Mrican	33.26.10.2002
		3.	Bulaksari	33.26.10.2003
		4.	Sumubkidul	33.26.10.2004
		5.	Kalijambe	33.26.10.2005
		6.	Sumublor	33.26.10.2006

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
		7.	Krasakageng	33.26.10.2007
		8.	Sijeruk	33.26.10.2008
		9.	Tegalsuruh	33.26.10.2009
		10.	Bulakpelem	33.26.10.2010
		11.	Gebangkerep	33.26.10.2011
		12.	Purworejo	33.26.10.2012
		13.	Kedungjaran	33.26.10.2013
		14.	Klunjukan	33.26.10.2014
		15.	Tegalontar	33.26.10.2015
		16.	Purwodadi	33.26.10.2016
XI	Bojong	1.	Bukur	33.26.11.2001
		2.	Kalipancur	33.26.11.2002
		3.	Sumurjomblangbogo	33.26.11.2003
		4.	Pantianom	33.26.11.2004
		5.	Randumuktiwaren	33.26.11.2005
		6.	Legokclile	33.26.11.2006
		7.	Bojongwetan	33.26.11.2007
		8.	Duwet	33.26.11.2008
		9.	Wangandowo	33.26.11.2009
		10.	Ketitangkidul	33.26.11.2010
		11.	Menjangan	33.26.11.2011
		12.	Ketitanglor	33.26.11.2012
		13.	Rejosari	33.26.11.2013
		14.	Bojonglor	33.26.11.2014
		15.	Bojongminggir	33.26.11.2015
		16.	Wiroditan	33.26.11.2016
		17.	Kemasan	33.26.11.2017
		18.	Jajarwayang	33.26.11.2018
		19.	Babalanlor	33.26.11.2019
		20.	Babalankidul	33.26.11.2020
		21.	Karangsari	33.26.11.2021
		22.	Sembungjambu	33.26.11.2022
XII	Wonopringgo	1.	Jetakkidul	33.26.12.2001
		2.	Sastrodirjan	33.26.12.2002
		3.	Legokgunung	33.26.12.2003
		4.	Galangpengampon	33.26.12.2004
		5.	Kwagean	33.26.12.2005



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
		6.	Getas	33.26.12.2006
		7.	Rowokembu	33.26.12.2007
		8.	Wonopringgo	33.26.12.2008
		9.	Sampih	33.26.12.2009
		10.	Wonorejo	33.26.12.2010
		11.	Gondang	33.26.12.2011
		12.	Jetaklengkong	33.26.12.2012
		13.	Pegadentengah	33.26.12.2013
		14.	Surobayan	33.26.12.2014
XIII	Kedungwuni	1.	Kedungpatangewu	33.26.13.2001
		2.	Pakisputih	33.26.13.2002
		3.	Rowocacing	33.26.13.2003
		4.	Langkap	33.26.13.2004
		5.	Tosaran	33.26.13.2005
		6.	Pajomblangan	33.26.13.2006
		7.	Proto	33.26.13.2007
		8.	Kwayangan	33.26.13.2008
		9.	Podo	33.26.13.2010
		10.	Salakbrojo	33.26.13.2011
		11.	Ambokembang	33.26.13.2012
		12.	Tangkiltengah	33.26.13.2014
		13.	Karangdowo	33.26.13.2015
		14.	Bugangan	33.26.13.2016
		15.	Rengas	33.26.13.2017
		16.	Tangkilkulon	33.26.13.2018
XIV	Buaran	1.	Coprayan	33.26.14.2001
		2.	Wonoyoso	33.26.14.2003
		3.	Pakumbulan	33.26.14.2005
		4.	Watusalam	33.26.14.2006
		5.	Simbangwetan	33.26.14.2007
		6.	Kertijayan	33.26.14.2009
		7.	Paweden	33.26.14.2010
XV	Tirto	1.	Wuled	33.26.15.2001
		2.	Ngalian	33.26.15.2002
		3.	Pandanarum	33.26.15.2003
		4.	Karanganyar	33.26.15.2004
		5.	Silirejo	33.26.15.2005

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
		6.	Pucung	33.26.15.2006
		7.	Sidorejo	33.26.15.2007
		8.	Samborejo	33.26.15.2008
		9.	Tanjung	33.26.15.2009
		10.	Pacar	33.26.15.2010
		11.	Dadirejo	33.26.15.2011
		12.	Karangjampo	33.26.15.2012
		13.	Tegaldowo	33.26.15.2013
		14.	Mulyorejo	33.26.15.2014
		15.	Jeruksari	33.26.15.2015
		16.	Curug	33.26.15.2016
XVI	Wiradesa	1.	Kadipaten	33.26.16.2001
		2.	Delegtukang	33.26.16.2002
		3.	Karangjati	33.26.16.2003
		4.	Petukangan	33.26.16.2004
		5.	Wiradesa	33.26.16.2005
		6.	Waru Kidul	33.26.16.2006
		7.	Bondansari	33.26.16.2007
		8.	Warulor	33.26.16.2008
		9.	Kampil	33.26.16.2009
		10.	Kemplong	33.26.16.2015
		11.	Kauman	33.26.16.2016
XVII	Siwalan	1.	Mejasem	33.26.17.2001
		2.	Wonosari	33.26.17.2002
		3.	Tengengkulon	33.26.17.2003
		4.	Tunjungsari	33.26.17.2004
		5.	Pait	33.26.17.2005
		6.	Tengengwetan	33.26.17.2006
		7.	Rembun	33.26.17.2007
		8.	Yosorejo	33.26.17.2008
		9.	Siwalan	33.26.17.2009
		10.	Boyoteluk	33.26.17.2010
		11.	Depok	33.26.17.2011
		12.	Blacanan	33.26.17.2012
		13.	Blimbingwuluh	33.26.17.2013
XVIII	Karangdadap	1.	Logandeng	33.26.18.2001
		2.	Jrebengkembang	33.26.18.2002



NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE DESA
		3.	Pagumenganmas	33.26.18.2003
		4.	Kedungkebo	33.26.18.2004
		5.	Kaligawe	33.26.18.2005
		6.	Karangdadap	33.26.18.2006
		7.	Kalilembu	33.26.18.2007
		8.	Pangkah	33.26.18.2008
		9.	Kebonrowopucang	33.26.18.2009
		10.	Kebonsari	33.26.18.2010
		11.	Pegandon	33.26.18.2011
XIX	Wonokerto	1.	Pesanggrahan	33.26.19.2001
		2.	Sijambe	33.26.19.2002
		3.	Bebel	33.26.19.2003
		4.	Werdi	33.26.19.2006
		5.	Rowoyoso	33.26.19.2007
		6.	Semut	33.26.19.2008
		7.	Tratebang	33.26.19.2009
		8.	Wonokertokulon	33.26.19.2010
		9.	Wonokertowetan	33.26.19.2011
		10.	Api-Api	33.26.19.2012
		11.	Pecakaran	33.26.19.2013

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAH, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009